Jurnal
Agama Buddha dan Ilmu Pengetahuan Vol. 4, No 1, Juli 2021: 88-102

POLITIK DALAM PANDANGAN AGAMA BUDDHA

Manggala Wiriya Tantra
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya
manggalawiriya@yahoo.co.id

ABSTRAK

Politik pada hakikatnya merupakan ilmu untuk mengatur negara agar membawa kemajuan dan kesejahteraan yang didasarkan pada kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam politik ditempatkan pada tempat yang paling mulia, sebagai landasan etik seorang politikus dalam melaksanakan tanggungjwabanya. Politik dalam pandangan agama Buddha diidentikan dengan syarat-syarat yang diajarkan Sang Buddha untuk kesejahteraan suatu bangsa. Tujuh syarat tersebut dilandasi dengan kebijaksanaan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebenaran. Istilah politik dan syarat kesejahteraan sama-sama bermakna cara untuk mengatur negara agar membawa kemajuan dan kesejahteraan.

kata kunci: politik, politik agama buddha, ajaran buddha

ABSTRACT

Politics is essentially a science to regulate the state in order to bring progress and prosperity based on wisdom. Wisdom in politics is placed in the most noble place, as the ethical foundation of a politician in carrying out his responsibilities. Politics in the view of Buddhism is identified with the conditions taught by the Buddha for the welfare of a nation. The seven conditions are based on wisdom that upholds the principles of truth. The terms politics and welfare terms both mean a way to regulate the state in order to bring progress and prosperity.

keywords: politics, buddhism politics, buddhist teachings

PENDAHULUAN

Agama Buddha adalah suatu agama yang berdasarkan pada ajaran yang telah berusia lebih dari 2540 tahun yang berasal dari anak benua India. Ajaran ini ditemukan dan diajarkan oleh Siddharta Gautama setelah mencapai penerangan sempurna (penyadaran penuh) dan kemudian dikenal dengan sebutan Buddha. Sebelum mencapai pencerahan sempurna, Sang Buddha adalah seorang pangeran yang bernama Siddharta Gautama dari kerajaan Sakya. Ayahnya bernama Suddhodana dan ibunya bernama Mahamaya. Siddharta Gautama lahir di Lumbini (berlokasi di Nepal) pada 563 Sebelum Masehi (Kusaladhamma, 2006: 22).

Pada usia 29 tahun Siddharta Gautama menyadari adanya penderitaan dalam kehidupan meskipun hidup dalam kemewahan, sehingga memutuskan untuk meninggalkan kehidupan duniawi dengan mencari jalan kebahagaiaan sejati. Setelah 6 tahun berjuang mempraktikkan berbagai cara praktik penyangkalan diri secara keras, akhirnya menemukan Jalan Tengah untuk mengakhiri penderitaan, mencapai kesempurnaan, kebahagiaan sejati. Kesempurnaan itu dicapai melalui perjuangan, dengan menjalani kehidupan sebagai manusia, Buddha tidak hanya mengajarkan, tetapi sekaligus menunjukkan jalan dan memberi teladan. (Mukti, 2003: 105).

Setelah mengubah cara berlatih yang ekstrem selama 6 tahun di hutan Uruvela, Pertapa Siddharta menyelesaikan praktik penyiksaan diri, pada saat itu adalah awal bulan Vesakha (April-Mei) setelah bulan Citta (Maret-April), mengingat upaya keras yang dijalani tidak membuahkan hasil menuju kebebasan (Sayadaw, 2009: 627). Pertapa Siddharta menjadi Buddha saat berusia 35 tahun (Widyadharma, 2004: 31). Pencapaian pencerahan sempurna setelah bertekad kuat di bawah pohon Boddhi di Bodh Gaya, India. Sang Buddha mengajarkan dharma kepada para siswa dan segenap mahluk selama 45 (empat puluh lima) tahun. Pada usia 80 tahun pada saat purnama siddhi pada bulan Visakha, di bawah pohon Sala yang terletak di luar kota Kusinara, Sang Buddha akhirnya Mahaparinibbana atau mangkat. (Warsana, 2009: 215)

Selama 45 (empat puluh lima) tahun mengajarkan Dharma, Buddha Gautama telah membabarkan banyak kotbah yang dipedomani hingga saat ini khususnya bagi pemeluk agama Buddha. Dharma tidak saja digunakan sebagai pedoman keagamaan bagi umat Buddha, tetapi juga pedoman dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak luput dari kebijakan politik di suatu negara. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana politik dalam perspektif agama Buddha yang sekaligus menjadi rumusan masalah dalam kajian ini.

KAJIAN TEORI

Pokok Ajaran Buddha

a. Tiratana

Agama Buddha mengajarkan manifestasi dari Yang Maha Esa dan Yang Maha Suci itu yang tampak di dunia ini, dan dilambangkan dengan ratana-ttaya, sebagai obyek dari emosi religius dalam kehidupan sehari-hari. Ratana-ttaya bukanlah personifikasi Tuhan melainkan lambang manifestasi dari Yang Maha Esam Yang Maha Suci, Abadi, yang bersapek tiga, yakni: *Buddharatana, Dharmaratana dan Sangharatana.* (Virana, 2008: 48).

Tiratana (Pali) atau *Tri Ratna* (Sansekerta) terdiri dari dua kata, yaitu 'Ti/Tri' dan 'ratana/ratna'. Ti/Tri artinya tiga dan ratana artinya mustika. Tiratana atau Triratna artinya Tiga Mustika, yaitu Buddha, Dhamma dan Sangha yang menjadi sosok tiang pokok agama Buddha. Ratana (Ratna) adalah permata, mustika yang tidak ternilai harganya dan tidak ada bandingnya. Tiga mustika ini penting bagi umat Buddha karena dengan adanya tiga mustika ini maka pembebasan diri dari penderitaan dapa dicapai.

Tiratana dalam agama Buddha adalah:

1. *Buddha-ratana* (mustika Buddha), yaitu Sang Buddha sebagai guru agung junjungan umat Buddha, yang telah memberikan ajaran kepada manusia dan para dewa agar dapat mencapai kebebasan mutlak, Nibbana.
2. *Dhamma-ratana* (mustika Dharma), yaitu Sang Dhamma sebagai ajaran Sang Buddha yang menunjukkan umat manusia dan para dewa jalan yang benar, terbebas dari kejahatan, dan membimbing mereka mencapai Nibbana.
3. *Sangha-ratana* (mustika Sangha), yaitu Sangha yang merupakan persaudaraan Bhikkhu Suci yang telah mencapai tingkat-tingkat kesucian *(Sottapana, Sakkadagami, Anagami, Arahat)* dan sebagai pengawal dan pelindung Dharma, serta mengajarkan Dhamma kepada orang lain untuk ikut melaksanakannya sehingga mencapai Nibbana.

b. Tilakhana

Tilakkhana adalah hukum tiga corak atau kondisi yang merupakan sifat-sifat mutlak dari segala yang ada di alam semesta ini. Tilakkhana atau tiga corak umum adalah tiga keadaan yang mencengkeram segala sesuatu dalam alam semesta, bahwa tidak ada suatu bentuk apapun yang bebas dari ketiga corak tersebut.

Ketiga corak umum yang universal tersebut menjadi dasar ajaran Sang Buddha mengenal *Tilakkhana*, yang terdiri dari:

1. *Anicca Lakkhana* (corak ketidakkekalan)
   Sabbe Sankhara Anicca artinya segala sesuatu yang muncul (timbul, terbentuk, dan bersyarat) adalah tidak kekal. Segala sesuatu yang tidak kekal terdiri atas tiga rangkaian, yakni *uppada* (timbul), *thiti* (berlangsung), dan *bhanga* (lenyap).

   Setiap peristiwa selalu dimulai dari awal, kemudian berlangsung dan akhirnya lenyap kembali. Alam semesta ini mengalami perubahan yang tak putus, tak ada suatu pun yang tetap sama selama dua saat berturut-turut. Realitas alam semesta bukanlah merupakan suat kolam yang tenang, akan tetapi merupakan suatu arus yang mengalir deras, suatu aliran. Tidak ada mahluk yang tetap, yang ada hanyalah segala sesuatu yang timbul dan tenggelam, muncul dan lenyap.
2. *Dukkha Lakkhana* (Corak Tidak Memuaskan)
   Sabbe Sankhara Dukkha adalah segala sesuatu yang muncul (timbul, terbentuk dan bersyarat) adalah dukkha (sulit dipertahankan, tidak menyenangkan). Dukkha terdiri dari:

a. *Dukkha Dukkhata*, adalah dukkha sebagai derita biasa, yakni kesakitan jasmani dan kesakitan batin.
b. *Viparinama Dukkhata*, adalah dukkha sebagai akibat dari perubahan-perubahan, keadaan

proses kehancuran atau kematian yang terjadi setiap saat, setiap jam.

c. *Sankhara Dukkhata*, adalah dukkha sebagai akibat dari keadaan yang berkondisi, keadaan dari bentuk-bentuk materi dan bentuk-bentuk batin yang dapat hidup apabila terus menerus dipertahankan, ditentukan, ditetapkan, dipelihara dengan segala tekad dan kesungguhan, dengan segala kemauan dan kekuatan dalam setiap keadaan.

3. *Anatta Lakkhana* (Corak Tanpa Inti)

Sabbe Dhamma Anatta adalah segala sesuatu yang muncul, bersyarat maupun yang tidak bersyarat adalah tanpa aku atau jiwa yang kekal. Sang Buddha secara analitis memperlihatkan bahwa dalam diri manusia terdiri dari batin dan jasmani beserta unsur-unsurnya, tidak dijumpai adanya atta, atau jiwa yang kekal.

Tiga corak universal ini meliputi segala sesuatu yang bersyarat maupun tidak bersyarat, dapat direalisasikan oleh orang yang telah terbebas dari semua belenggu kehidupan. (Virana, 2008: 56-58).

c. Cattari Ariya Saccani

Empat Kebenaran Mulia *(Cattari Ariya Saccani)* adalah kebenaran yang mengarahkan pada pembebasan penderitaan. Empat Kebenaran Mulia terdiri dari:

1. Kebenaran Mulia tentang Dukkha *(Dukkha Ariyasacca)*

Kelahiran, usia tua dan kematian adalah dukkha, kesakitan, keluh kesah, ratap tangis, kesedihan dan putus asa adalah dukkha, berpisah yang dicintai, berkumpul dengan yang tidak disenangi, dan tidak memperoleh apa yang diingini adalah dukkha, dengan ringkas, jasmani dan batin (segala bentuk kehidupan adalah dukkha).

2. Kebenaran Mulia tentang Asal Mula Dukkha *(Dukkhasamudaya Ariyasacca)*

Sebab munculnya dukkha disebabkan oleh tanha (kehauan atau nafsu keinginan yang tak habis-habisnya) yang menghasilkan kelangsungan kembali atau kelahiran berulang-ulang yang terikat oleh hawa nafsu dan yang mencari kenikmatan baru di sana-sini. Sumber dukkha lainnya adalah noda-noda kekotoran batin *(kilesa)* dan bersumber dari ketidaktahuan batin *(avijja).*

3. Kebenaran Mulia tentang Lenyapnya Dukkha *(Dukkhanirodha Ariyasacca)*

Lenyapnya dukkha disebut sebagai Nibbana (Nirvana). Sang Buddha menjelaskan Nibbana, sebagai berikut: ini adalah aman tenteram, ini adalah suci, luhur, dimana semua bentuk kamma telah berhenti, gugurnya semua lapisan kehidupan, padamnya keinginan nafsu *(tanha)*, disanalah Nibbana (Nirvana).

4. Kebenaran Mulia tentang Jalan Menuju Lenyapnya Dukkha *(Dukkhanirodha Gaminipatipada Ariyasacca)*

Jalan untuk melenyapkan dukkha dikenal dengan *Ariya Magga* atau Jalan Tengah *(Majjhima Patipada)*, yaitu jalan untuk mencapai keariyaan dan menjadi ariya puggala (mahluk suci).

Jalan Tengan ini terdapat 3 (tiga) kelompok, yakni *Sila, Samadhi dan Panna.*

Kelompok Sila, dibagi menjadi 3 yaitu *Samma Vacca* (Ucapan Benar), *Samma Kammanta* (Perbuatan Benar) dan *Samma Ajiva* (Penghidupan/Mata Pencaharian Benar). Kelompok *Samadhi* dibagi menjadi 3

yaitu *Samma Vayama* (Daya Upaya Benar), *Samma Sati* (Perhatian Benar) dan *Sama Samadhi* (Meditasi Benar). Kelompok *Panna* dibagi menjadi 2 yaitu *Samma Ditthi* (Pandangan/Pemahaman Benar) dan *Samma Sankappa* (Pikiran Benar). Kedelapan inilah yang membentuk jalan untuk melenyapkan dukkha. (Virana, 2008: 58-71).

d. Kamma dan Punabbhava

1. Kamma

Kamma artinya perbuatan, yang arti umum meliputi semua jenis kehendak dan maksud perbuatan, yang baik maupun yang buruk, lahir dan batin, dengan pikiran, kata-kata atau tindakan. Kamma adalah semua kehendak atau itikad dengan tidak membeda-bedakan apakah itu baik maupun buruk.

Kamma adalah hukum alam impersonal yang bekerja sesuai dengan tindakan seseorang. Kamma adalah hukum tersendiri dan tidak ada pemberi hukum. Kamma bekerja tanpa ada campur tangan dari sosok pengatur eksternal. Dalam *Anguttara Nikaya III: 415*, Sang Buddha berkata, bahwa kehendak untuk berbuat (cetana) itulah yang dinamakan kamma. Sesudah berkehendak, orang lantas berbuat dengan badan jasmani, perkataan atau pikiran.

2. Punabhava

Punabhava diartikan sebagai lahir kembali atau kehidupan menjadi lagi. Ajaran kelahiran kembali merupakan salah satu aspek dari Buddha Dhamma dan bertalian erat dengan hukum karma. Konsep kelahiran kembali dalam ajaran Buddha merupakan ajaran yang menyatakan tentang adanya kehidupan yang berulang-ulang kali dari mahluk.

Kelahiran kembali merupakan bagian dari kehidupan dan kehidupan adalah suatu arus kesadaran yang berlangung terus berdasarkan kekuatan kamma. Kematian manusia yang kita lihat sehari-hari hanyalah merupakan perubahan wujud atau bentuk saja, karena sesungguhnya arus kehidupan dari orang-orang yang dikatakan meninggal itu telah terlahir kembali secara otomatis (langsung) di suatu alam tertentu atau di bumi kita, sebagai dewa, manusia, setan atau mahluk dalam neraka. Kelahiran kembali ini ditentukan oleh kamma (perbuatan) sendiri. (Virana, 2008: 72-88).

e. Paticcasamuppada

Paticcasamuppada berarti Hukum Sebab Musabab yang Saling Bergantungan, atau muncul bersamaan karena syarat-syarat yang saling bergantungan. Hukum *Paticasamuppada* didefinisikan sebagai berikut:

1. *Imasmim Sati Idam Hoti* (Dengan adanya ini, terjadilah itu)
2. *Imassupada Idam Uppajjati* (Dengan timbulnya ini, timbullah itu)
3. *Imasming Asati Idam Na Hoti* (Dengan tidak adanya ini, tidak adalah itu)
4. *Imassa Nirodha Idam Nirujjati* (Dengan tidak timbulnya ini, tidak timbullah itu)

Pada prinsipnya *Paticcasamuppada* adalah hukum yang menyatakan bahwa segala sesuatu ada sebab yang mendahului dan ada akibat yang timbul dari adanya suatu sebab, demikian juga sebaliknya. Apabila tidak ada sebab yang mendahului, maka tidak akan ada

akibat yang ditimbulkan. (Virana, 2008: 89-91).

f. Nibbanna

Nibbana adalah padamnya keinginan, ikatan-ikatan, nafsu-nafsu, kekotoran batin. Dengan demikian, Nibbada adalah kesunyataan abadi, tidak dilahirkan *(na uppado pannayati*), tidak termusnahkan *(na vayopannayati),* ada dan tidak berubah *(na thitassa annathatan pannayati).* Nibbana adalah tujuan hidup umat Buddha, yang merupakan pencapaian spriritual tertinggi. (Virana, 2008: 91).

Definisi Politik

Kata politik tentu pernah bahkan sering kita dengar, mungkin sejak di bangku sekolah telah dikenalkan oleh guru kita, hingga saat ini kita bisa mengetahui dari berbagai sumber, seperti media massa, seminar dan juga media sosial. Saat mendengar kata politik tentu saja setiap orang memiliki pandangan yang berbeda, ada yang menganggap politik itu sebagai suatu hal yang positif, ada pula masyarakat yang menganggap politik itu buruk atau negatif.

Meskipun terdapat dua sisi pandangan yang berbeda tentang politik, sadar atau tidak sebenarnya politik turut mempengaruhi kehidupan setiap warga negara. Sebagai contoh sederhana adanya pengaruh politik dalam kehidupan masyarakat adalah ketika negara melalui pemerintah mewajibkan seluruh warga negara mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan membayar pajak. Contoh lainnya adalah ketika harga bahan bakar minyak mengalami penurunan, kita sebagai masyarakat tentu merasakan dampaknya.

Kewajiban bagi warga negara untuk memiliki KTP sesuai ketentuan dan adanya kewajiban membayar pajak merupakan suatu keputusan mengikat yang merupakan salah satu bentuk dari politik. Meskipun keputusan negara bersifat memaksa dan mengikat, tentu ada nilai positif yang terdapat dalam keputusan yang bersifat memaksa dan mengikat seluruh warga negara tersebut.

Dimanapun kita berada atau tergabung dalam suatu wadah atau lembaga, baik lembaga pendidikan, sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya, maka tidaka akan terlepas dari sesuatu yang dinamakan politik, dimana-mana ada nilai-nilai politik yang biasanya berupa aturan yang telah ditetapkan untuk dipatuhi. Saat kita sedang memilih ketua kelas atau ketua perkumpulan sekecil apapun ada nilai-nilai politik disana, yakni nilai keterwakilan. Kadang kita tidak menyadari akan hal itu dan menganggapnya sebagai suatu kebiasaan saja.

Setiap organisasi atau lembaga yang berdiri di suatu negara tentu saja wajib mengikuti aturan atau konstitusi yang berlaku di negara tersebut, misalnya di Indonesia setiap organisasi harus sejalan dengan ideologi Pancasila, apabila tidak konsekuensinya dapat dibubarkan. Maka dari itu suka atau tidak suka sebenarnya kita juga terlibat dalam politik walaupun dalam skala yang tidak besar, karena partisiapasi politik tidak identik dengan menjadi anggota partai politik.

Seorang penyair asal Jerman Bertolt Brecht Jerman (1898-1956) menyampaikan pandangannya, bahwa buta yang terburuk adalah buta politik. Dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa,

harga sepatu dan obat, semua tergantung pada keputusan politik. Orang buta politik begitu bodoh, sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya seraya mengatakan bahwa ia membenci politik. *Si dungu* tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahir pelacur, anak terlantar, pencuri terburuk dari semua pencuri, politisi buruk, dan rusaknya perusahaan nasional serta multinasional yang menguras kekayaan negeri.

Ungkapan Bertlolt tersebut tersirat cukup frontal juga menohok, namun demikian kita tentu saja mempunyai pilihan tersendiri secara bijak tentang bagaimana memposisikan diri dan sejauhmana kapasitas kita terlibat dalam politik. Plato dan Aristoteles menamakan politik sebagai *en dam onia atu the goog life (*Miriam Budiardjo, 2009: 13), penamaan ini memiliki maksud bahwa politik bertujuan untuk melindungi dan mencapai sebuah tujuan masyarakat yang sejahtera. Definisi ini menandakan sejatinya politik mempunyai arti positif, namun demikian sebagian masyarakat menganggap politik itu kotor karena melihat peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh sebagian aktor-aktor politik menggunakan kekuasan secara sembrono.

Sejarah asal mula kata ‘politik’ berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis* (Steven, 2011: 55) yang merupakan negara kota di dalamnya terdapat sekelompok individu yang dinamakan masyarakat, pemerintah yang mengatur, melindungi dan menjaga kepentingan masyarakat, pemerintah, serta terdapat sebuah wilayah dengan batas tertentu yang di dalamnya terdapat pemerintahan serta masyarakat (Miriam Greenblatt, 2005: 163-164.) . Di dalam *polis* hidup sekelompok individu (masyarakat) yang menurut Aristoteles adalah sebagai mahluk politik (*zoon politicion) (*Aristotle: 2000).

Dalam suatu tatanan pemerintah yang di dalamnya terdapat masyarakat memegang peranan penting untuk mewujudkan ketertiban, membawa masyarakat sejahtera, serta melindungi masyarakat dari segala bentuk ancaman, sebagai kata lain pemerintah menjalankan fungsi keamanan dan pertahanan bagi seluruh warga negaranya.

Sebagai sebuah ilmu, politik mempunyai subjek, objek, terminologi, teori, ciri, dan metodologi, serta diterima secara universal, yaitu dapat diajarkan dan dipelajari banyak orang. Politik dikatakan sebagai sebuah seni karena politik itu luhur, sebagai cara memperjuangkan kepentingan bersama, sebagai seni untuk transformasi menuju negara demokrasi yang damai.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang tentang partai politik yang di dalamnya memuat suatu redaksional tentang pendidikan politik sebagai upaya mengenalkan politik kepada masyakat luas. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik: 3.)

Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan politik adalah ilmu pengetahuan mengenai ketatanegaraan, seperti tata cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan yang berlandaskan kebijaksanaan (Poerwadarminta, 2007: 905). Pemaknaan politik ini menunjukkan, bahwa politik bukanlah alat untuk memanfaatkan rakyat dengan semena-mena demi keuntungan pelaku politik. Poltik merupaka ilmu tata cara untuk mengatur pemerintahan yang dilandaskan pada kebijaksanaan.

Kebijaksanaan lahir dari pikiran dan nurani manusia yang didasarkan pada kebenaran, bukan pembenaran. Aktor-aktor politik di negeri ini seharusnya mampu memberikan teladan kepada masyarakat agar citra politik dan pastisipasi politik masyarakat semakin baik. Partisipasi politik masyarakat dinilai sebagai kepedulian masyarakat akan kondisi bangsa dan negaranya, bukan semata-mata dijadikan sebagai objek pembangunan, namun sebagai subjek dalam pembangunan negara.

Menurut pendapat Gettel politik adalah ilmu yang membahas negara, hal tersebut berlaku baik antar seseorang dengan orang lain yang paling ujung sekalipun disentuh hukum, hubungan antar perorangan, ataupun kelompok orang-orang dengan negaranya, serta hubungan negara dengan negara (Inu Kencana Syafiie, 2010 : 11). Pendapat Gettel menegaskan bahwa politik merupakan ilmu yang membahas seluruh lapisan masyarakat yang menekankan pada hubungan baik antar seseorang dengan yang lain, dan diatur oleh hukum. Hal ini mengingatkan kita, bahwa politik mengatur rakyat agar saling menghargai dan berperilaku baik dengan yang lain.

Dalam hal ini politik dapat berfungsi sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia dengan mengatur masyarakat agar saling menghargai dan berperilaku baik antara satu dengan yang lain sehingga tidak ada hak asasi yang diganggu maupun dilanggar.

Negara membutuhkan nilai-nilai etis, nilai-nilai kebenaran universal yang dapat dipahami dan diimplementasikan masyarakat sehingga terwujud tatanan masyarakat yang bermoral dan beretika. Armada Riyanto berpendapat bahwa politik adalah sebuah disiplin ilmu yang mengedepankan kebenaran-kebenaran etis bagi tata hidup bersama. Politik juga disebut sebagai paradigma, yang memiliki karakteristik fundamental konsistensi. Konsistensi yang rasional, atau masuk akal. Konsistensi filosofis identik dengan penemuan jati diri tata kehidupan bersama dan konsistensi praktis merujuk pada keteguhan untuk membela prinsip-prinsip kebenaran pada kehidupan sehari-hari (Riyanto, 2011 : 53.)

Budaya masyarakat dapat terbentuk melalui budaya Kebenaran-kebenaran etis sebagai pedoman tata hidup bersama dalam jangka waktu tertentu akan mengerucut menjadi sebuah budaya masyakat. politik. Budaya politik sangat penting bagi pemerintahan manapun. Budaya politik diartikan sebagai produk dari konsentrasi kekuasaan komunikasi dalam negara dan dalam institusi masyarakat sipil untuk membentuk agenda politik. Dalam hal ini tentu saja dibutuhkan komunikasi dua arah yang akan menghasilkan mufakat demi tercapainya tujuan bersama, tanpa mendeskriminasi hak siapapun. (Keith, 2010 : 196.)

Budaya politik dapat berimplikasi pada moral politisi. Ilmu politik dalam hal ini termasuk ilmu pengetahuan tidak boleh tunduk pada pertimbangan lain di luar ilmu pengetahuan, sehingga malah mengalami distorsi. Asumsinya, selama politikus tetap berada di jalur politik, maka tidak akan mengorbankan kepentingan umum dan tidak akan merugikan siapapun, dalam hal ini adalah masyarakat.

Definisi-definisi politik yang telah diuraikan diawal memperjelas sejatinya politik adalah suatu cara mengatur tatanan hidup masyarakat oleh negara berlandaskan nilai-nilai kebenaran didasarkan pada kebijaksanaan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan dapat terwujud apabila aktor-aktor politik berada pada jalur yang benar dengan

mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi maupun golongan.

Politik sesungguhnya merupakan cara memperjuangkan kepentingan bersama untuk transformasi menuju negara demokrasi yang maju dan damai, bukan untuk mengumbar hawa nafsu dan keserahakan melalui jabatan publik yang diemban.

Ajaran Buddha Tentang Politik

Berbicara soal politik tidak akan pernah terlepas dari pemerintahan, karena tidak ada satu pemerintahan pun di dunia ini yang tidak mempunyai suatu sistem politik. Setiap upaya-upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan negara dapat dikatakan sebagai praktik politik. Politik diidentikan dengan sebuah kebijakan yang lahir dari negara untuk mengakomodir kepentingan rakyat.

Sejarah perkembangan ilmu politik di Indonesia dapat ditelaah dari munculnya kerajaan-kerajaan di nusantara, seperti Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat yang bercorak Hindu-Buddha (abad ke-4 hingga abad ke-7), Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Utara yang berkembang pesat pada abad ke-7 hingga abad ke-14, serta Kerajaan Majapahit di Jawa Timur Yusa Djuyandi, 2019: 8).

Perkembangan politik tanah air apabila dihitung sejak munculnya jaman kerajaan di nusantara, artinya sudah sangat tua bahkan jauh lebih tua dari usia kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerajaan-kerajaan tersebut menggambarkan cerminan negara yang di dalamnya terdapat pemerintah, masyarakat dan wilayah dengan batas-batas tertentu. Selama memerintah, raja-raja kerajaan nusantara khususnya yang bercorak agama Buddha tentunya memiliki kebijakan-kebijakan politik yang dianut dan bersifat mengikat bagi seluruh rakyatnya. Kebijakan-kebijakan kerajaan tentu tidak hanya mencakup politik saja, melainkan juga terdapat kebijakan ekonomi, pertahanan, serta sosial budaya yang saat ini bisa kita lihat peninggalan-peninggalannya seperti candi Borobudur, Candi Sewu, Candi Jiwa, Candi Muara Jambi dan sebagainya.

Dokumen sejarah setidaknya memberikan gambaran bahwa terdapat beberapa catatan berkembangnya kerajaan Majapahit terutama pada masa pemerintahan Hayam Wuruk didukung oleh beberapa faktor, yaitu:

1. adanya sistem pemerintahan yang efektif
2. adanya keajegan/kestabilan pemerintahan
3. kehidupan agama yang baik
4. terselengggaranya upacara kemegahan di istana
5. tumbuh kembangnya berbagai kesenian
6. Hidupnya perniagaan Nusantara dengan Jawa (Majapahit)
7. pelaksanaan politik Majapahit terhadap nusantara
8. adanya pengakuan internasional dari negara-negara lain di Asia (Adrisijanti, , 2014: 53-54)

Luasnya wilayah Majapahit bukan merupakan hasil ekspansi politik semata, melainkan karena alasan yang didorong oleh kepentingan perdagangan yang perlu dilindungi dengan menempatkan daerah-daerah itu sebagai pangkalan yang memang harus dikuasai.

Majapahit dapat berkembang pesat dengan dukungan berbagai aspek yang terutama berasal dari dukungan faktor alam, serta sistem pemerintahan serta masyarakat pendukungnya. Catatan ini menunjukkan bahwa kekuatan suatu

pemerintahan selain faktor alam dan efektifitas sistem pemerintahan, faktor penting lainnya adalah dukungan masyarakat terhadap pemerintah.

Politik didefinisikan sebagai cara untuk mensejahterakan suatu bangsa. Kita dapat mengingat kembali bagaimana Buddha mengajarkan dharma (ajaran kebenaran) sebagai upaya membebaskan semua mahluk dari penderitaan, artinya dharma merupakan salah satu cara untuk mensejahterakan bangsa dengan membebaskan diri dari penderitaan. Sejarah mencatat selain di Indonesia terdapat kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang memeluk agama Buddha, yaitu Asoka.

Raja Aśoka adalah raja ketiga dari dinasti Maurya di abad ketiga SM yang menjadi penguasa pertama dari kesatuan India dan salah satu tokoh politik terbesar sepanjang masa. Setelah memeluk ajaran Buddha, Asoka mengubah pemerintahannya dari sistem penaklukan militer menjadi pemerintahan berdasarkan Dharmavijaya, kemenangan dengan kebenaran dan kebenaran.

Dengan memberikan perlindungan kerajaan untuk penyebaran agama Buddha baik di dalam maupun di luar kerajaannya, ia membantu penyebaran agama Buddha menjadi agama dunia yang menyebar dengan damai, khususnya di seluruh wajah Asia. Di ibukota salah satu pilar yang didirikan Asoka adalah roda dengan banyak jari-jari. Ini merupakan representasi dari roda Dhamma yang digerakkan oleh Buddha sebagai simbol yang dipilih untuk menghiasi bendera negara India modern. (Anuradha: 1994 : 1.)

Hampir semua prasasti Aśoka tentang dhamma, namun tidak bermaksud secara khusus untuk agama Buddha, tetapi kebenaran secara universal bagi semua. Tradisi terbaik dari Agama Buddha dan kerajaan India adalah deklarasi Aśoka memberikan dukungan untuk semua agama. Dukungan ini jauh melampaui batas toleransi, Asoka mempersembahkan tempat untuk pertapa selain buddhis, berulang kali mengatakan, bahwa brahmana dan samana semuanya layak dihormati dan mengatakan kepada masyarakat untuk tidak pernah merendahkan agama lain.

Asoka menyatakan banyak spesies hewan yang harus dilindungi, awalnya dengan mengurangi pembunuhan untuk dapur kerajaan, hingga tidak ada pembunuhan hewan yang spesiesnya dilindungi untuk dikonsumsi semua rakyatnya. Maklumat atau perintah Asoka tersebut merupakan tindakan politik yang selaras dengan moral.

Pemikir Buddha di Myanmar cenderung mempertimbangkan tindakan politik dan perubahan politik sebagai praktik moral yang pada dasarnya secara intrinsik terkait dan dipengaruhi oleh perilaku yang benar atau salah dari individu. (Walton, 2017: 66.) Pandangan ini tentang sifat politik dalam kaitannya dengan teks Tipitaka, yakni Aganna Sutta dan Cakkhavati Sihanada Sutta.

Setiap aktivitas pemilihan pemimpin, baik di level terendah hingga tertinggi di dalamnya terdapat unsur atau nilai politik yakni kepemimpinan. Dalam Aganna Sutta, Buddha menjelaskan tentang asal usul pemilihan seseorang untuk mewakili kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan untuk memimpin.

Pemilihan berawal dari munculnya hal-hal jahat di tengah-tengah penduduk karena terjadi peristiwa pencurian yang bersumber dari keserakahan. Selanjutnya para penduduk berkumpul dan berunding untuk menunjuk satu pendunduk tertentu untuk mencela yang patut

dicela, mengusir yang patut diusir dan menghukum yang patut dihukum.

Tidak hanya itu para penduduk sepakat untuk memberikan sebagian beras sebagai imbalannya. Selanjutnya mereka mendatangi salah satu di antara mereka yang paling tampan, paling menarik, paling menyenangkan dan mampu serta memintanya untuk melakukan hal tersebut untuk mereka. (Walshe, 2009: 426-427.) Peristiwa ini menunjukkan kepada kita, bahwa sejak dahulu ternyata sudah terdapat suatu mekanisme politik tentang kepemimpinan yang justru dipilih dan diusulkan dari masyarakat. Artinya pilihan pemimpin lahir dari inisiatif dan kepercayaan masyarakat terhadap seseorang yang dianggap mampu dan layak untuk memimpin. Pilihan penduduk disebut sebagai Mahà-Sammata yang merupakan gelar pertama yang diperkenalkan.

Mekanisme pemberian upah atau yang saat ini lebih dikenal dengan gaji ternyata juga sudah ada dengan mengumpulkan sebagian beras dari masyarakat untuk diberikan kepada pemimpinnya. Nilai kepemimpinan politik seperti ini mengisyaratkan bahwa masyarakat berharap kepada pemimpin agar fokus melayani dan menjalankan tugasnya dengan baik serta mampu menegakkan aturan dengan setegak-tegaknya, maka masyarakat mengambil inisiatif peran untuk mencukupi kebutuhan hidup pemimpin dengan memberikan sebagian haknya.

Dalam Cakkavati-Sihanadà Sutta Digha Nikàya, Buddha memberikan contoh tugas seorang raja yang bernama Dalhaneni. Dalhaneni adalah seorang raja yang adil, penakluk empat penjuru, yang telah mengukuhkan keamanan di wilayahnya dan memiliki tujuh pusaka, yaitu pusaka roda, pusaka gajah, pusaka kuda, pusaka permata, pusaka perempuan, pusaka perumah tangga, dan yang ke tujuh, pusaka penasihat. Ia berdiam setelah menaklukkan tanah yang dikelilingi oleh lautan tanpa menggunakan tongkat atau pedang, melainkan dengan hukum.

Tugas seorang raja harus berpegang teguh pada dhamma (ajaran kebenaran), menjadikan dhamma sebagai lencana, mengakui dhamma sebagai guru. Harus menjaga dan melindungi rumah tangga, pasukan, penduduk desa dan kota, para petapa dan Brahmana, binatang-binatang liar dan burung-burung sesuai dhamma. Tidak membiarkan kejahatan menyerang kerajaan, dan bagi mereka yang membutuhkan, wajib diberikan barang-barang kebutuhan mereka.

Petapa dan Brahmana mana pun dalam kerajaan yang meninggalkan kehidupan indriawi dan menjalani praktik kesabaran dan kelembutan, mengendalikan diri, menenangkan diri, dan berusaha untuk mengakhiri keserakahan, dari waktu ke waktu maka harus dikunjungi dan berkonsultasi dengan mereka sehubungan dengan apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang patut dicela dan apa yang tanpa cela, apa yang harus diikuti dan apa yang tidak boleh diikuti, dan perbuatan apa yang dalam jangka panjang akan mengakibatkan kemalangan dan penderitaan, dan apa yang menghasilkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Setelah mendengarkan mereka, harus menghindari kejahatan dan melakukan kebajikan. (Walshe, 2009: 407-408)

Sebagai seorang pemimpin terdapat aturan moral yang sekaligus menjadi pedoman hidup, yakni tidak membunuh, tidak mengambil apa yang tidak diberikan, tidak melakukan hubungan seksual yang salah, tidak berbohong dan tidak meminum minuman keras dan makan secukupnya. Secara detail terdapat dua belas kewajiban penguasa dunia, yaitu:

1. Memerintah berdasarkan kebenaran
2. Memberikan tempat dan perlindungan kepada lingkungan atau keluarga yang dekat dengan penguasa dunia
3. Memberikan tempat dan perlindungan kepada Angkatan bersenjata
4. Memberikan tempat dan perlindungan kepada gubernur dan pejabat pemerintah
5. Memberikan tempat dan perlindungan kepada keluarga kerajaan dan staf sipil
6. Memberikan tempat dan perlindungan kepada pertapa, perumah tangga, pengrajin dan pedagang
7. Memberikan tempat dan perlindungan kepada penduduk kota dan desa
8. Memberikan tempat dan perlindungan kepada penganut agama
9. Memberikan tempat dan perlindungan kepada satwa liar dan burung
10. Mencegah terjadinya penyelewengan di dalam kerajaan
11. Membagikan harta kepada orang miskin, dan
12. Meminta nasihat kepada para pertapa, mengarah pada kebaikan yang lebih tinggi.

Pemimpin yang sungguh-sunguh melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan berdasarkan kebenaran akan membawa rakyat sejahtera, aman dan damai.

Fondasi dari nilai-nilai dhamma dalam upaya menguatkan politik kebangsaan dan kenegaraan dapat diterapkan dan diadopsi bagi seluruh negara di dunia, termasuk negara yang menganut sistem demokrasi.

Agar demokrasi berhasil, orang-orang harus dididik dan dilatih untuk mempraktikkan *Dhammadipateya*, penegak Dhamma. (P.A Payutto, 2000: 22-23). Kualitas ini yang mereka miliki dapat diekspresikan melalui sistem demokrasi. Dalam masyarakat demokratis, orang akan mengalah demi kebenaran, kebaikan, akal dan kemanfaatan, untuk menyelesaikan masalah. Masyarakat demokrasi yang relatif sukses karena menyampaikan aspirasi atas dasar kebenaran.

Kebenaran, kebaikan, alasan, manfaat, dan pemecahan masalah semuanya dapat dijelaskan dengan satu istilah buddhis "dharma." Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam masyarakat demokratis, orang-orang akan mengalah pada satu sama lain karena menghormati dhamma, dan dhamma dipegang di atas satu individu atau kepentingan pribadi apa pun. Orang akan menjunjung tinggi, menghormati dan harus menjunjung supremasi Dhamma.

Ada 3 (tiga) jenis supremasi dalam buddhisme yang dapat dijadikan sebagai rujukan terhadap upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu:

1. Supremasi *Attadhipateyya* yang berarti menempatkan supremasi sentral ke diri sendiri, baik untuk karir, posisi, reputasi, status dll *(self-centred)*
2. Supremasi *Lokadhipateyya* yang artinya menempatkan supremasi kepada dunia dalam arti nilai-nilai duniawi, dengan kepentingan grup, kelompok, agar mendapatkan pengakuan komunitas *(community centred).*
3. Supremasi *Dhammadhipateyya* yang menempatkan supremasi prinsip-prinsip dhamma, seperti, moralitas, kejujuran, sebab akibat, fakta kebenaran (data, riset, dll), hukum dan undang-undang.

Dari ketiga supremasi tersebut yang terbaik untuk dijadikan sebagai referensi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah supremasi *Dhammadhipateyya.*

METODE KAJIAN

Penulis menginginkan artikel ilmiah ini dapat memberi manfaat bagi seluruh orang yang membaca dan memberikan motivasi belajar yang tinggi utamanya terkait ilmu pengetahuan. Jenis penelitian dalam artikel ilmiah ini penulis lakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Terdapat 4 (empat) ciri utama studi kepustakaan: (1) peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka, (2) data pustaka bersifat siap dipakai, (3) data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, (4) kondisi data pustaka tidak dibatasi ruang dan waktu (Zed, 2008 : 3-6).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diawal telah disebutkan bahwa arti kata politik diidentikan dengan cara mensejahterakan suatu bangsa, dalam buddhisme terdapat ajaran tentang bagaimana mewujudkan suatu tatanan masyarakat, suatu tatanan kehidupan bernegara yang sejahtera dan mampu bertahan lama.

Dalam Mahaparinibbana Sutta Digha Nikaya, Buddha membabarkan ajaran tentang syarat kesejahteraan yang apabila dipraktikkan membawa kemakmuran dan tidak akan membawa kemunduran. Tujuh Syarat Kesejahteraan bangsa tersebut adalah:

1. Sering berkumpul mengadakan musyawarah.
2. Dalam musyawarah selalu menganjurkan perdamaian.
3. Menetapkan peraturan baru dan meneruskan peraturan yang lama.
4. Menunjukkan rasa hormat dan bakti kepada orang yang lebih tua.
5. Melarang keras adanya penculikan-penculikan terhadap para wanita.
6. Menghormati tempat-tempat suci.
7. Menghormati orang-orang yang patut dianggap suci. (Walshe, 2009 : 201.)

Ketujuh prinsip ini diajarkan Buddha kepada suku Vajji saat berada di kuil Sarandada di Vesali. Ketujuh prinsip ini diajarkan dengan tujuan agar mencegah kemunduran, dan selama tujuh prinsip ini dipertahankan, selama prinsip-prinsip ini masih berlaku, para Vajji akan makmur dan tidak mundur.

Dalam Sutta Pitaka Kuddhanikaya, Jataka Volume V (Wijaya, 2009: 521-524).

Buddha menceritakan kehidupan lampauNya, saat menjadi boddhisatva terlahir sebagai raja angsa yang memimpin sembilan puluh ribu angsa. Boddhisatva dan panglima angsa yang kemudian dipertemukan dengan Raja Kasi dan Ratu Khema oleh pemburu, menjelaskan bagaimana caranya memimpin kerajaan.

Kerajaan yang dipimpin oleh Raja Kasi adalah kerajaan makmur karena dipimpin dengan benar. Raja memiliki orang-orang yang benar sebagai para menteri dan pejabat kerajaan, yang bebas dari kesalahan dan keburukan, yang siap mati demi raja yang baik. Raja memiliki seorang istri yang statusnya sama dengannya, patuh, santun dalam ucapan, diberkahi dengan anak, rupawan, nama nan indah, dan penurut terhadap suaminya.

Kerajaan berada dalam keadaan bahagia, bebas dari segala tindak penindasan, tidak dikuasai oleh tindakan semena-mena,

melainkan dipimpin dengan benar. Raja mengusir orang-orang jahat dari kerajaan, memberikan kehormatan kepada orang-orang baik, segala keburukan dijauhkan darinya, dan mengikuti jalan yang benar. Raja juga menyaradari betapa cepatnya waktu kehidupan berputar, dengan berada dalam sepuluh kebenaran, kehidupan berikutnya baginya akan bebas dari penderitaan.

Sepuluh kebenaran itu adalah kedermawanan, moralitas, kemurahan hati, kejujuran, kelembutan, pengendalian diri, welas asih, belas kasih, kesabaran, kesantunan.

Sepuluh kualitas seorang raja yang kemudian disebut sebagai rajadhamma sama dengan *dāna* (kedermawanan), *sīla* (moralitas), *pariccāga* (kemurahan hati), *ajjava* (kejujuran), *maddava* (kelembutan), *tapo* (pengendalian diri), *akkodha* (cinta kasih), *avihimsā* (belas kasih), *khanti* (kesabaran), *avirodhana* (kesantunan).

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, beberapa referensi tentang kepemimpinan dan politik untuk mewujudkan suatu tatanan pemerintah yang baik demi kesejahteraan, nilai-nilai buddhisme yang relevan dapat diadopsi dan digunakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

PENUTUP

Syarat kesejahteraan suatu negara yang telah diuraikan oleh Sang Buddha apabila ditaati maka akan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi negara tersebut. Pada zaman Sang Buddha Gautama masih hidup, lebih dari 2500 tahun yang lalu tentu belum terdapat istilah politik, seperti era saat ini. Ajaran tentang cara untuk mendapatkan kesejahteraan bagi suatu negara hanya dikenal sebagai aturan yang sebaiknya ditaati agar memperoleh kesejahteraan suatu bangsa. Sedangkan saat ini, politik disebut sebagai ilmu yang mengatur pemerintahan yang dilandaskan pada kebijaksanaan. Berdasarkan inti dari pengertian syarat kesejahteraan dengan politik adalah relevan, karena keduanya mengandung makna yang sama, yaitu cara untuk mengatur suatu negara agar tercipta suatu kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Daftar Pustaka

Anuradha Seneviratna. (1994). *King Asokha and Buddhism, Histoty and Literacy Studies.* Kandy, Sri Lanka: Buddhist Publication Society.

Aristotle. (2000.) *Politics*, John Berseth (ed.), New York: Dover Publications.

Armada Riyanto. (2011). *Berfilsafat Politik.* Yogyakarta: Kanisius.

Faulk, Keith. (2010). *Sosiologi Politik Pengantar Kritis.* Bandung: Nusa Media.

Inajati Adrisijanti. (2014). *Majapahit, Batas Kota dan Kejayaan di Luar Kota.* Yogyakarta: Kepel Press.

Inu Kencana Syafiie. (2010.) *Ilmu Politik.* Jakarta: Rineka Cipta.

Johan Wijaya. (2009). *Sutta Pitaka Kuddhanikaya, Jataka Volume V.* Medan: Indonesia Tipitaka Center.

Kusaladhamma. (2006). *Kronologi Hidup Buddha.* Jakarta: Ehipassiko Foundation.

Maurice Walshe. (2009.) *Khotbah-Khotbah Panjang Sang Buddha, Digha Nikaya.* Jakarta: DhammaCitta Press.

Miriam Budiardjo. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Miriam Greenblatt. (2005). *Human Heritage: A World History,* New York: Glencoe.

Mukti, Krishnanda Wijaya. (2003). *Wacana Buddha Dharma*. Jakarta: Yayasan Dharma Pembangunan.

P.A Payutto. (2000). *Buddhist Solutions for the twenty-first century*. Bangkok: Buddhadhamma Foundation.

Poerwadarminta. (2007). *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Richard G. Steven. (2011.) *Political Philosophy: An Introduction,* New York: Cambridge University Press.

Sayadaw, Mingun. (2009). *Riwayat Agung Para Buddha, The Great Chronicle of Buddhas.* Jakarta: GiriMangala Publication.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Virana. (2008). *Ensiklopedia Buddha Dharma, Keyakinan Umat Buddha*. Jakarta: Santusita.

Walton, J Matthew. (2017). *Buddhism, Politic, and Political Thought in Myanmar,* United Kingdom: Cambridge University Press.

Warsana. (2009). *Riwayat Hidup Buddha Gotama*. Jakarta: Yanwreko Wahana Karya.

Widyadharma. (2004). *Riwayat Hidup Buddha Gotama.* Jakarta: Yayasan Pendidikan Buddhis Nalanda.

Yusa Djuyandi. (2019.) *Pengantar Ilmu Politik, Edisi Kedua*. Depok: Rajawali Pers.